



STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS TENAGA KERJA DALAM MENYONGSONG MEA 2015

Rinaldi
UPBJJ-UT Semarang
E-MAIL : aldi313farisi@gmail.com

Subtema: peluang dan tantangan SDM Indonesia di berbagai sektor pembangunan dan pasar tenaga kerja di pasar ekonomi regional ASEAN

Abstrak

Komunitas ASEAN 2015 akan berdampak pada sektor pembangunan dan pasar tenaga kerja di pasar ekonomi regional ASEAN. Tenaga kerja Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi lapangan kerja yang semakin terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia 43% dari jumlah total penduduk ASEAN. Pemberdayaan kualitas SDM wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh 90% SDM dan 10% SDA. Pemberdayaan kualitas SDM dengan sukses menjadikan peluang besar Indonesia untuk memimpin Komunitas ASEAN 2015, karena dengan kualitas SDM yang baik dapat mengolah SDA Indonesia yang sangat melimpah.

Kata kunci: komunitas ASEAN, pemberdayaan SDM, peluang dan tantangan SDM

Abstract

ASEAN Community 2015 will have an impact on the construction sector and the labor market in the ASEAN regional economic markets. Indonesian workers have a significant opportunity to fill the jobs that increasingly open, given the number of Indonesia's population 43% of the total population of ASEAN. Empowerment of human resource quality must be done by the Indonesian government in the face of an ASEAN Community 2015 The progress of a country is determined by 90% human resource and 10% natural resource. Empowerment quality of human resources to successfully make a great chance to take the lead Indonesia ASEAN Community in 2015, due to the good quality of human resources to process natural resources are very abundant Indonesia.

Keywords: ASEAN community, human resource development, opportunities and challenges human resource

PENDAHULUAN

Asean Economic Community (AEC) merupakan kesepakatan yang dibangun oleh sepuluh negara anggota ASEAN. Terutama di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan perekonomian di kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah internasional agar ekonomi bisa tumbuh merata, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan.

AEC merupakan realisasi dari Visi ASEAN 2020 yaitu untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. Menurut Prof Hermanto Siregar terdapat beberapa konsep dalam AEC yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio-Culture Community.

Ketiga hal tersebut akan direalisasikan di antara negara-negara anggota ASEAN secara bertahap. Untuk langkah pertama yang akan direalisasikan adalah AEC pada 2015 mendatang, setidaknya terdapat 5 hal yang akan diimplementasikan yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja terampil.

Pada 2015 di antara 10 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Laos, dan Kamboja, dan Vietnam harus membebaskan 5 hal di atas untuk menerapkan aturan dari kesepakatan tersebut.

Sebelumnya pada 2004, Indonesia bersama ASEAN telah menyepakati perjanjian dengan China yang dikenal sebagai ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Dengan perjanjian itu, negara-negara ASEAN dan China harus membebaskan barang-barang masuk.

Dalam pelaksanaan AEC, negara-negara ASEAN harus memegang teguh prinsip pasar terbuka dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Dengan kata lain, konsekuensi diberlakukannya AEC adalah liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan tenaga terampil secara bebas dan tanpa hambatan tarif dan nontarif.

Rencana pemberlakuan AEC tersebut dicantumkan dalam Piagam ASEAN yang disahkan pada 2007. Pada tahun tersebut pula disepakati bahwa pencapaian AEC akan dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Pengesahan AEC sendiri dicantumkan pada pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN dan diperkuat dengan pembentukan Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Council) yang tercantum dalam lampiran I Piagam ASEAN. Itulah dasar hukum yang mengesahkan terbentuknya ASEAN Economic Community.

Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil. SDM Indonesia memiliki peluang untuk mendukung perekonomian dalam AEC karena jumlah penduduk Indonesia 43% dari total seluruh penduduk ASEAN. SDM Indonesia dalam hal ini merupakan tenaga kerja yang harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, kerja sama pemerintah, swasta dan masyarakat umum diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang terampil.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

KLASIFIKASI TENAGA KERJA

Berdasarkan penduduknya

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

3. Berdasarkan Batas Kerja

a. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

Contoh kelompok ini adalah:

- a. anak sekolah dan mahasiswa
- b. para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
- c. para pengangguran sukarela

4. Berdasarkan kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

MASALAH KETENAGAKERJAAN

Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi mendatang, persaingan dalam proses kegiatan ekonomi dan perdagangan antarnegara dalam hubungan intraregional dan internasional akan dialami oleh seluruh negara di dunia. Indonesia yang merupakan bagian dari perekonomian yang sifatnya terbuka yang secara langsung terpengaruh oleh segala perubahan yang telah dan akan terjadi pada Era Globalisasi. Sebagai bentuk persiapan menghadapi era globalisasi dunia, para pemimpin dari negara-negara tingkat regional membuat kesepakatan untuk memberlakukan ASEAN Economic Community (AEC) dalam mengintegrasikan wilayah ASEAN. Dengan kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia harus sudah mempersiapkan dengan baik dan matang segala sesuatu yang ada di negara dari berbagai sektor bidang.

Bukanlah hal yang dapat dianggap remeh karena ASEAN *economic community* (AEC) tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (Free Trade Area) untuk mewujudkan sebuah single market (Suteja: 2013). *Asean Economic Community* (AEC) siap untuk dijalankan pada tahun 2015 tepatnya bulan Desember di kawasan negara – negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Philipina, Brunei Darussalam, Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja serta Timor Leste. ASEAN Economic Community (AEC) 2015 adalah komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung demi terwujudnya ekonomi yang terintegrasi (Anya: 2013). Konsep utama dari ASEAN Economic Community adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerja sama yang saling menguntungkan. Kehadiran ASEAN Economic Community bisa membantu ketidakberdayaan negara-negara ASEAN dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil (Diah: 2013).

Untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan dalam AEC bukanlah hal yang mudah meskipun tiap negara sudah mempunyai komoditi-komoditi andalan yang siap diluncurkan,

namun yang paling mendasar adalah kesiapan sumber daya manusia itu sendiri yang berperan paling penting karena sebagai pelaku dari AEC. Sementara, Lodofitus Dando memaparkan, hasil penelitian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwa kemajuan sebuah bangsa 90% ditentukan oleh SDM dan 10% oleh SDA. Indonesia memiliki SDA yang melimpah, tapi kalau SDM-nya minim itu tidak berarti (Inspirasi:2013). Pengembangan sumber daya manusia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan mengingat jumlah penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih sekitar 150 juta jiwa lebih. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta orang atau bertambah 1,7 juta orang dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2013. Penduduk pekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12 juta orang yang terdiri atas pendidikan diploma sebesar 3,1 juta orang atau 2,65 persen dan pendidikan universitas sebesar 8,8 juta orang atau 7,49 persen. Penduduk yang memiliki jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 55,3 juta orang atau 46,8 persen, diikuti pendidikan SMP sebanyak 21,1 juta orang atau 17,82 persen.

ASEAN Economic Community (AEC) yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2015, menjadi suatu tantangan dan juga peluang bagi para tenaga kerja dalam negeri untuk bersaing dengan tenaga kerja dari seluruh anggota Negara ASEAN. Berdasarkan data Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2013, tercatat sebanyak 68.957 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 72.427 orang, walaupun terjadi penurunan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia namun tenaga profesional asing masih banyak dipekerjakan untuk menduduki posisi-posisi tertentu terutama di perusahaan besar yang berorientasi internasional di Indonesia. Republik Rakyat China, Jepang, Korea Selatan, India dan Malaysia masih tetap mendominasi jumlah total TKA yang bekerja di Indonesia. Melihat fakta yang terjadi dengan ketenagakerjaan di Indonesia tersebut, pemerintah, para pemilik perusahaan dan para tenaga kerja Indonesia harus mempersiapkan kualitas dan profesionalitas dari para tenaga kerja dalam menghadapi AEC 2015 agar mempunyai daya saing yang kuat dengan negara ASEAN yang lain dan lebih mendominasi pekerjaan/posisi di perusahaan di negaranya sendiri. Maka tenaga kerja terampil sangat dibutuhkan untuk menghadapi AEC 2015.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja Indonesia?
2. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA 2015?

TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui mengenai informasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN
2. Mengetahui dan memahami pentingnya tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan profesional untuk menghadapi MEA

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara langsung peneliti melakukan penelitian kepada sumber data/responden. Hasil yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini akan berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dll. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian (Burhanuddin:2013).

2. Jenis dan Sumber Data

Paper ini menggunakan jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti internet, buku, koran, majalah dan media lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kajian pustaka. Data yang diambil adalah data yang diperoleh dari artikel elektronik, dan website sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Jenis Penelitian

Metode deskripsi analisis merupakan metode yang digunakan dalam paper ini yaitu dengan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dibahas, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kejadian atau masalah secara runtut, sistematis, faktual dan juga terpercaya.

PEMBAHASAN

1. Strategi Peningkatan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Kerja Indonesia

Komunitas ASEAN 2015 akan berdampak pada sektor pembangunan dan pasar tenaga kerja di pasar ekonomi regional ASEAN. Tenaga kerja Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi lapangan kerja yang semakin terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia 43% dari jumlah total penduduk ASEAN. Namun jumlah penduduk yang banyak tidak menjamin Indonesia dapat mengisi peluang tersebut, diperlukan SDM yang berkualitas agar dapat bersaing dengan SDM negara-negara lain anggota dari MEA. Dalam laporan *The Global Competitiveness Index 2012-2013*, Indonesia menempati posisi ke-50 dari 144 negara di dunia dengan skor 4,4, atau turun 4 level dari tahun lalu yang berada di posisi 46. Di kawasan ASEAN, daya saing Indonesia sendiri berada pada posisi ke 40, lebih baik dari Filipina di urutan 59 dan Vietnam dengan rating 70, Laos 81, Kamboja 88 atau Myanmar di posisi 139. Indonesia masih berada di bawah Thailand dengan rating 37, Brunei Darussalam di posisi 26, dan Malaysia di

peringkat ke 24. Data ini menunjukkan posisi tawar daya saing Indonesia sedikit mengkhawatirkan dibandingkan dengan negara tetangga. Betapa bangsa besar ini masih kurang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga yang secara defacto sumber daya alam sedikit. Dari segi pendidikan, sebagian besar SDM Indonesia dalam hal ini tenaga kerjanya masih memiliki pendidikan yang rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta orang atau bertambah 1,7 juta orang dibandingkan jumlah penduduk yang berkerja pada Februari 2013. Penduduk pekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12 juta orang yang terdiri atas pendidikan diploma sebesar 3,1 juta orang atau 2,65 persen dan pendidikan universitas sebesar 8,8 juta orang atau 7,49 persen. Penduduk yang memiliki jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 55,3 juta orang atau 46,8 persen, diikuti pendidikan SMP sebanyak 21,1 juta orang atau 17,82 persen.

Pemberdayaan kualitas SDM wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh 90% SDM dan 10% SDA. Pemerintah harus bersinergi dengan para pengusaha (swasta) dan masyarakat umum agar pemberdayaan kualitas SDM sektor tenaga kerja dapat berjalan baik dan menghasilkan. Pemberdayaan kualitas sumber daya manusia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan mengingat jumlah penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih sekitar 150 juta jiwa lebih. Namun hal tersebut bukan suatu penghalang untuk terwujudnya tujuan tersebut. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui:

- a. Jalur formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan kursus-kursus.
- b. Jalur nonformal, yang terdiri atas:
 - 1) Latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) di setiap Daerah Tingkat II.
 - 2) Magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Magang umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat sebagai tempat latihan kerja. Tujuannya, setelah magang siswa menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kegiatan magang merupakan bagian dari proses *Link and Match* (Keterkaitan dan Kecocokan).
 - 3) Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya mengutamakan segi pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Akan tetapi, kualitas mental dan spiritual seperti: keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, inovatif, cerdas, bisa saling menghargai dan bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan juga perlu ditingkatkan.
 - 4) Meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan Tenaga kerja tidak mampu bekerja dengan baik bila kurang gizi dan kurang sehat. Kurang gizi bahkan bisa menurunkan kualitas otak (kecerdasan) yang justru sangat dibutuhkan dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan pemberian gizi dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.

- 5) Meningkatkan pengadaan seminar, *workshop* yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu.

Dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas dari tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan AEC. Profesionalitas kerja juga akan menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan lebih berkomitmen terhadap perusahaan. Kualitas kerja yang lebih baik akan meningkatkan output perusahaan yang lebih baik dan banyak sesuai target atau mungkin dapat melebihi target yang diinginkan perusahaan. Strategi yang tepat harus diaplikasi dan diawasi oleh berbagai pihak serta dievaluasi agar meraih keberhasilan untuk memenangkan persaingan di AEC dan juga pasar global dan dapat mendominasi ketenagakerjaan dalam negeri sendiri.

2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi MEA 2015

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.

Berikut di bawah ini merupakan upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga kerja Indonesia.

a. Adjustment Training

Kepala Badan Nasional Penanggulangan dan Penempatan Tenaga Kerja, Nusron Wahid, mengatakan tengah mempersiapkan Adjustment Training jelang moratorium pekerja non-skill. Langkah itu dilakukan, sebab 62 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal itu disampaikan Nusron usai menghadiri acara pelepasan perawat dan *caregiver* asal Indonesia untuk bekerja di Jepang, pada Rabu 10 Juni 2015 di kediaman Kedutaan Besar Jepang daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Nusron mengatakan, bagi lulusan SD dan SMP biasanya hanya terakses dengan pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (PRT). "Maka kita akan Adjustment Training dengan membuat kurikulum untuk meningkatkan kapasitas dia menjadi *skilled* untuk bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan seperti *careworkers*," ujar Nusron.

Sementara itu, Deputi Penempatan BNP2TKI, Agusdin Subiantoro mengatakan pelatihan untuk pekerja non-skill sedang diperbincangkan dan kurikulum akan disusun oleh Kemenaker, Kemenkes, dan Kemdikbud.

"Untuk menyusun kurikulum harus disesuaikan dengan job yang diminta oleh negara yang meminta," kata Agusdin.

Agusdin menambahkan lama pelatihan direncanakan akan disetarakan seperti Diploma 1 (D1). Namun, jika bisa dilakukan intensif, mungkin bisa berjalan hingga enam bulan.

Sementara itu, untuk sertifikat, kata Agusdin, akan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Sumber: VIVA.co.id

Adjustment Training merupakan program BNP2TKI untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Program ini bertujuan agar para TKI tidak ditempatkan pada posisi PRT namun agar bisa masuk ke *careworkers*.

Program adjustment training memiliki kurikulum dan lama pelatihan akan disertakan seperti Diploma 1. Para peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa telah menjalani adjustment training.

b. Jalur pendidikan

Pendidikan merupakan syarat wajib daripada kualitas dan profesionalitas tenaga kerja. Perbedaan jauh terjadi antara tenaga kerja tidak terdidik dengan tenaga kerja terdidik. Namun di Indonesia sendiri, tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi hanya sekitar 10% dari jumlah total tenaga kerja yang dimiliki Indonesia (BPS 2014). Upaya pemerintah melalui jalur pendidikan yaitu dengan membuat program wajib belajar 9 tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat.

c. Kemenkue menyediakan Tax Incentive bagi orang yang mau mengadakan pelatihan kerja

Jakarta, 02/04/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintah menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengingatkan, saat ini Indonesia tidak boleh hanya menggantungkan perekonomian pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah.

"Saya rasa negara seperti Indonesia tidak bisa terus menerus menghasilkan *natural resources* atau buruh murah. Sejalan dengan harga komoditas, harga energi yang menurun, kita harus bergerak," ungkap Menkeu dalam acata *The Asean Economic Congress* pada Rabu (2/4) di Jakarta.

Seperti diketahui, di antara tiga negara yang termasuk dalam *middle income country* yaitu Brazil, Afrika Selatan dan Korea Selatan, hanya Korea Selatan yang berhasil menjadi negara ekonomi industri. “Karena mereka (Korea Selatan) fokus pada inovasi dan teknologi. Untuk itu, Asia harus bergerak ke arah *knowledge-based economy*,” jelas Menkeu.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. “Kemenkeu sedang menyiapkan menyediakan *tax incentive* untuk orang yang mau membuat pelatihan, karena itu akan memberikan dasar untuk kualitas *human resources* yang lebih baik,” jelas Menkeu.(wa)

PENUTUP

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bakal menjadi faktor kunci dalam memenangi persaingan pada era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di penghujung 2015 nanti. Penelitian menyatakan bahwa keberhasilan suatu negara ditentukan oleh 90% SDM dan 10% SDA. Indonesia merupakan negara yang memiliki SDA melimpah jika SDM Indonesia memiliki kualitas baik tentu SDA yang melimpah dapat terolah dengan baik. Dengan hasil olahan tersebut menjadi modal Indonesia untuk menyongsong MEA 2015 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Tantangan dan peluang SDM Indonesia datang dari dalam maupun luar. Selain menghadapi fakta bahwa SDM masih kurang berkualitas karena 50% lebih berpendidikan SD, SDM asing juga akan memasuki Indonesia.

Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam ASEAN Economic Community adalah tenaga kerja terampil. Namun hal tersebut bukan suatu penghalang untuk terwujudnya tujuan tersebut. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui:

1. Jalur formal, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan dan kursus-kursus.
2. Jalur nonformal, yang terdiri atas:
 - a. Latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) di setiap Daerah Tingkat II.
 - b. Magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Magang umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap tepat sebagai tempat latihan kerja. Tujuannya, setelah magang siswa menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Kegiatan magang merupakan bagian dari proses *Link and Match* (Keterkaitan dan Kecocokan).
 - c. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya mengutamakan segi pengetahuan, keahlian dan



- keterampilan. Akan tetapi, kualitas mental dan spiritual seperti: keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, inovatif, cerdas, bisa saling menghargai dan bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan juga perlu ditingkatkan.
- d. Meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan Tenaga kerja tidak mampu bekerja dengan baik bila kurang gizi dan kurang sehat. Kurang gizi bahkan bisa menurunkan kualitas otak (kecerdasan) yang justru sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan pemberian gizi dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
 - e. Meningkatkan pengadaan seminar, *workshop* yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- https://id.wikipedia.org/wiki/Faktor_produksi
https://www.academia.edu/8267194/Tenaga_kerja
<http://news.okezone.com/read/2013/02/19/373/764175/rektor-ugm-indonesia-butuh-tenaga-kerja-terampil>
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/636628-cara-bnp2tki-buat-pekerja-lulusan-sd-terampil>
http://www.kompasiana.com/risnajayanti/strategi-meningkatkan-kualitas-dan-profesionalitas-tenaga-kerja-dalam-menghadapi-asean-economic-community_54f9641ea3331100448b5248
<http://anitaervina.blogspot.com/2012/02/makalah-kualitas-tenaga-kerja-indonesia.html>
<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-berkomitmen-tingkatkan-kualitas-tenaga-kerja-indonesia>
<http://forum-mikomunitas.blogspot.com/>
<http://adwintaactivity.blogspot.com/2012/04/peranan-pemerintah-dalam-menanggulangi.html>
<http://id.stie-stmy.ac.id/berita-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-asean.html>